

LAPORAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
MAGETAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yaitu Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 2025
KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA
KABUPATEN MAGETAN

SUWITO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV, c
NIP. 19731229 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan dan Susunan Organisasi	5
C. Tugas dan Fungsi Organisasi	6
D. Sumber Daya Organisasi	7
1. Kepegawaian	7
2. Sarana dan Prasarana	9
3. Anggaran	10
E. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Perangkat Daerah	13
F. Landasan Hukum	16
G. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026	19
1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026	
2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026	
3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	33
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	46
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	46
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	48
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	50
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya	52
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	52

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	56
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	63
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	65
D. Inovasi Tahun 2024	70
E. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024	73
BAB IV PENUTUP	75
A. Simpulan	
B. Rencana Aksi Tahun 2025	
 LAMPIRAN	
A. Matriks Renstra terakhir	84
B. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya	101
C. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir	104
D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya	112
E. Pengukuran Kinerja	116
F. Pohon Kinerja	117
G. <i>Crosscutting</i>	118
H. <i>Cascading</i>	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2024 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2024 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selaku unsur pembantu Bupati dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan

LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

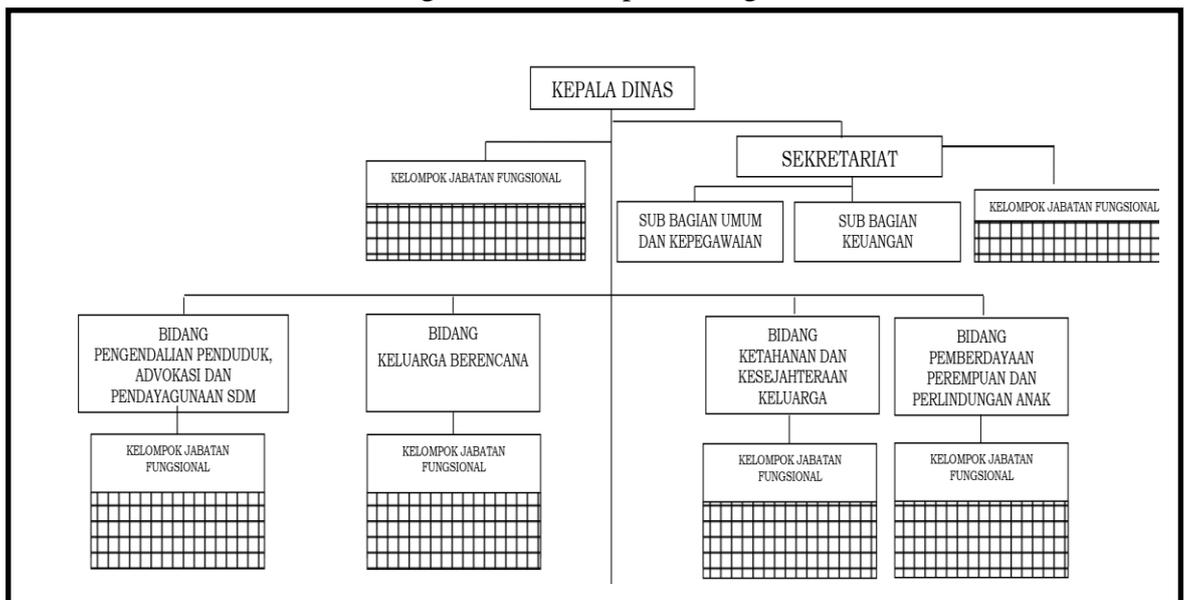
Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pada pasal 2 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dipimpin oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri atas:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Keluarga Berencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pada pasal 4 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan didukung oleh pegawai sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
1	Kepala Dinas	1	0	-1
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Bidang	4	4	0
4	Kepala Sub Bagian	2	1	-1

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
5	JF Perencana Ahli Madya	1	0	-1
6	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	3	0	-3
7	JF Perencana Ahli Muda	1	0	-1
8	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	8	5	-3
9	JF Perencana Ahli Pertama	1	0	-1
10	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	8	0	-8
11	Penelaah Teknis Kebijakan	8	3	-5
12	Fasilitator Pemerintahan	1	0	-1
13	Pamong Pemerintahan	1	0	-1
14	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	2	0	-2
15	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	0	-2
16	Pengolah Data Dan Informasi	10	2	-8
17	Pengadministrasi Perkantoran	5	3	-2
18	Operator Layanan Operasional	16	0	-16
19	Pengelola Umum Operasional	1	0	-1
	Jumlah	76	19	57

Berdasarkan tabel diatas bahwa kebutuhan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan adalah sebanyak 76 orang. Sedangkan saat ini jumlah pegawai yang ada hanya 19 orang, sehingga kebutuhan akan pegawai sejumlah 57 orang.

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2024

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	-
2	Pembina Utama Muda/IV-c	-
3	Pembina Tk.I/IV-b	1
4	Pembina/IV-a	5
5	Penata Tk.I/III-d	6
6	Penata/III-c	1
7	Penata Muda Tk.I/III-b	1
8	Penata Muda/III-a	4
9/II-d	1
10/II-c	-

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
11/II-b	-
12/IIa	-
	Jumlah	19

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	3
3	Strata 1/Sederajat	12
4	Diploma	1
5	SMA/Sederajat	3
6	SMP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-
	Jumlah	19

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	9
2	Perempuan	10
	Jumlah	19

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
per 31 Desember 2024
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	Rp 121.504.304,-	-	-	Rp 121.504.304,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp 10.118.952.022,-	Rp 743.368.000,-	Rp 137.713.300,-	Rp 10.724.606.722,-
3	Gedung dan Bangunan	Rp 5.350.258.174,-	Rp 1.935.171.772,-		Rp 7.285.429.946,-

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.500.000,-	-		Rp 2.500.000,-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 565.236.000,-	-		Rp 565.236.000,-
	Jumlah	Rp 16.158.450.500,-	Rp 2.678.539.772,-	Rp 137.713.300,-	Rp 18.699.276.972,-

3. Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024. Alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.281.610.937,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100	%	965.396.800
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1	Kegiatan	235.000.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1	Kegiatan	730.396.800
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	71,9	%	5.959.601.137

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	12	Kegiatan	1.554.403.200
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100	%	1.121.582.937
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	100	%	2.951.865.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	%	331.750.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	73	%	4.128.600.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	797.800.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	3.330.800.000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	43	%	170.000.000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	50.000.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan	2	Dokumen	120.000.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan	100	%	300.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	300.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA)	76	Skor	100.000.000
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	100.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	1	Kegiatan	200.000.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	1	Kegiatan	120.000.000
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM	1	Kegiatan	80.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN DPPKBPPPA terhadap Layanan Kesekretariatan DPPKBPPPA	80,5	Skor	5.604.581.805
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14	Dokumen	125.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	87	%	2.925.681.805
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Dokumen	360.000.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Unit	872.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Dokumen	1.101.900.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	163	Unit	220.000.000
TOTAL				17.428.179.742

E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil

kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (Tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait dengan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Pembangunan Keluarga.
 - 1) Meskipun TFR rendah tetapi unmetneed masih tinggi dan peserta KB MKJP rendah, hal ini dapat menjadi peluang besar untuk kenaikan TFR. Pada tahun 2022, nilai TFR 2,10 akan tetapi nilai peserta MKJP hanya 31,64% dan unmetneed sebesar 9,29% dimana nilai unmetneed tersebut masih diatas target dari provinsi yaitu 8,40%.
 - 2) Peserta KB baru belum bisa dijadikan peserta tambahan pada peserta KB aktif, hal ini dikarenakan tingginya angka drop out/DO.
 - 3) Kualitas kepesertaan ber-KB masih rendah, hal ini terbukti dari rendahnya peserta KB MKJP yaitu sebesar 31,64% pada tahun 2022.
 - 4) Masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan KB MOW dimana capaian pada tahun 2022 hanya 115 peserta dari target 160 peserta.
 - 5) Rendahnya partisipasi dan komitmen pria terhadap program KB, hal ini terlihat dari peserta KB pria yang masih sangat rendah yaitu sebesar 2,96% dibandingkan peserta KB Wanita sebesar 97,04%.
 - 6) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga masih rendah, hal ini terbukti dari jumlah PUS dengan masih adanya usia istri < 20 tahun.
 - 7) Kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi masih rendah, hal ini terbukti masih rendahnya peserta papsmear yaitu hanya 1,40% peserta pada tahun 2022
 - 8) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin, dimana pada tahun 2022 capaian KB pascasalin sebesar 84,49%.
 - 9) Masih minimnya sekolah yang sudah menerapkan program sekolah siaga kependudukan yaitu sebanyak 156 sekolah dari seluruh tingkatan sekolah yang ada (SD, SMP, SMA).
 - 10) Masih minimnya jumlah desa/ kelurahan yang sudah menjadi kampung keluarga berkualitas yaitu sebanyak 24 desa dari total 235 desa/kelurahan yang ada di

Kabupaten Magetan

b. Permasalahan terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Masih rendahnya partisipasi remaja dalam pembinaan kesehatan reproduksi. Saat ini jumlah PIK Remaja sebanyak 189 kelompok terdiri dari kelompok jalur Pendidikan dan jalur masyarakat. Kelompok PIK Remaja yang aktif sebanyak 71 Kelompok, Kurang aktif sebanyak 89 Kelompok dan kelompok tidak aktif sebanyak 20 kelompok.
- 2) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pembangunan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usia kawin pertama dibawah usia 20 tahun yaitu sebanyak 6,96% dari total perkawinan pada tahun 2022.
- 3) Masih banyak calon pengantin yang belum terdaftar lewat aplikasi elsimil yang telah disediakan oleh pemerintah. Pada tahun 2022, dari total 2.994 calon pengantin, yang terdaftar pada aplikasi hanya sebanyak 2.354 atau 78,6%.
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan resiko stunting.
- 5) Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Magetan. Prevalensi stunting Kabupaten Magetan pada tahun 2021 sebesar 17,2% dan pada tahun 2022, berdasarkan hasil studi SSGI angka stunting kabupaten Magetan 14,9%.

c. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.
- 2) Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legeslatif yaitu sebesar 15,55% pada tahun 2022, nilai tersebut masih dibawah target capain nasional sebesar 30%.
- 3) Masih rendahnya kedudukan perempuan sebagai pimpinan dalam lembaga, institusi lainnya. Saat ini pejabat dalam Lembaga dan instansi di dominasi oleh laki-laki dibanding perempuan.
- 4) Masih rendahnya kontribusi atau sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
- 5) Kurangnya pemberdayaan terhadap lansia perempuan
- 6) Kurangnya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas perempuan

d. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

- 1) Masih rendahnya perempuan korban kekerasan yang melapor pada instansi yang

berwenang. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan pada tahun 2022 hanya sebanyak 23 kasus.

2) Masih banyaknya perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan

e. Permasalahan terkait perlindungan anak:

1) Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak melalui media sosial.

2) Belum terpenuhinya hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Perumusan Isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas kepesertaan ber-KB masih rendah hal ini dapat dilihat dari rendahnya peserta KB MKJP
2. Masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan KB MOW
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pembangunan keluarga.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan resiko stunting.
5. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Magetan.
6. Masih minimnya sekolah yang sudah menerapkan program sekolah siaga kependudukan yaitu sebanyak 156 sekolah dari seluruh tingkatan sekolah yang ada (SD, SMP, SMA).
7. Masih minimnya jumlah desa/ kelurahan yang sudah menjadi kampung keluarga berkualitas yaitu sebanyak 24 desa dari total 235 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Magetan
8. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.
9. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legislatif
10. Masih rendahnya perempuan korban kekerasan yang melapor pada instansi yang berwenang..
11. Masih banyaknya perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan
12. Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak melalui media sosial.
13. Belum terpenuhinya hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Peraturan Bupati nomor: 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang Hasil Pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor 050/10/403.202/2024 tanggal 1 Februari 2025

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

	utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi..
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV	PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN	1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi Bupati Magetan Tahun 2024 - 2026

Tujuan ke-2 RPD : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran RPD: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Indeks Kesehatan Masyarakat
Strategi RPD : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan
Arah Kebijakan RPD : Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam perencanaan keluarga sejahtera
Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana
Tujuan OPD: Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) • Indikator : Indeks Ketimpangan Gender • Indikator : Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)
Sasaran OPD:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengendalian Penduduk <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Total Fertility Rate (TFR)

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Indek Peberdayaan Gender (IDG) 4. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Rasio KDRT 5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya 6. Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Nilai SAKIP pada Dinas PPKB PP dan PA • Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB PP dan PA |
|---|

1. Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Magetan periode 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Tujuan yang didukung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu Tujuan RPD ke-2 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing serta mendukung Sasaran RPD ke-1 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan dan Arah Kebijakan Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam perencanaan keluarga sejahtera.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2025

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan periode 2024-2026. Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
					2024	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan		<ul style="list-style-type: none"> • Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) • Indeks Ketimpangan Gender • Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) 	<p>Angka</p> <p>Angka</p> <p>Skor</p>	0,61	0,60	0,58
					0,171	0,168	0,166
					700	700	700

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA			
					2024	2025	2025	
	Perlindungan Anak							
		1.1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,085	2,08	2,07
		1.2	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,5	65	65,5
		1.3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,1	72,15	72,2
		1.4	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	Rasio	0,02 - 0,05	0,02 - 0,05	0,02 - 0,05
		1.5	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	%	0,837	0,827	0,817
		1.6	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP pada Dinas PPKB PP dan PA	Skor	87	88,5	90
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB PP dan PA	Skor	83,95	83,97	84

Sumber : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak periode 2024-2026

3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 20xx-20xx

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2025

VISI : Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera			
MISI :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dukungan manajemen yang handal dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui advokasi dan pemberdayaan sdm 3. Meningkatkan manajemen pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB serta kesehatan reproduksi 4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga 			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Advokasi Terhadap pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR	Meningkatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi yang efektif serta peningkatan profesionalisme aparatur, pemberdayaan institusi dan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat
		Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina	Pengadaan sarana kerja bagi Kader Bina Keluarga dan meningkatkan pembinaan bagi kader-kader Bina Keluarga

		Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia untuk mewujudkan keluarga yang bahagia	
		Peningkatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok UPPKS untuk menjadi peserta KB dan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga	Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok UPPKS
		Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan) serta penguatan lembaga dan organisasi di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.	Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas dengan didukung kerja sama yang baik dengan stakeholder serta memperkuat lembaga dan organisasi yang mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Peningkatan advokasi dan KIE kepada stakeholder dan perempuan seksual aktif tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks (papsmear)	Meningkatkan pemahaman dan keikutsertaan untuk deteksi dini kanker serviks (papsmear)
	2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Peningkatan fungsi dan peran program Generasi Berencana (GenRe) melalui tiga komponen yaitu PIK Remaja (PIK-R), Saka Kencana dan Duta GenRe	Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

		Optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan pendampingan terhadap sasaran catin, ibu hamil, ibu pasca salin	Orientasi dan pelatihan kepada Tim Pendamping keluarga dalam melakukan pendampingan terhadap sasaran serta pencatatan dan pelaporan
		Optimalisasi kegiatan Minilokakarya dan Audit Kasus Stunting dengan melibatkan TPPS, TPK, Tim Teknis dan Tim Pakar	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait kegiatan Minilokakarya Stunting dan Audit Kasus Stunting
		Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang mendukung intervensi gizi spesifik dan sensitif	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah pendukung percepatan penurunan stunting di Magetan
		Optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam memberikan edukasi terkait ATM dan dampaknya terhadap risiko stunting	Meningkatnya pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit ATM (Aids, Tuberkulosis, Malaria)
		Peningkatan Advokasi pada SSK	Meningkatnya sekolah sebagai Sekolah Siaga Kependudukan
		Peningkatan kompetensi pengelola Sekolah Siaga Kependudukan	Meningkatnya Kualitasa Sekolah Siaga Kependudukan
		Peningkatan Advokasi pada Kampung KB	Meningkatnya desa atau kelurahan menjadi kampung Keluarga Berkualita

		Peningkatan Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan)	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan)
		Optimalisasi pendataan keluarga dalam menyajikan data dasar yang menggambarkan kondisi riil keluarga, sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan kontribusi pendataan keluarga dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
	3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan peran serta perempuan dalam semua aspek pembangunan	Peningkatan peran serta perempuan dalam semua aspek pembangunan
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.
		Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya	Pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan politik dan sosial budaya
		Peningkatan kapasitas perempuan dalam Proporsi Kursi yang di duduki Perempuan di DPRD	Pelibatan perempuan dalam Kursi yang duduk di DPRD
	4. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.

		pemulangan dan reintegrasi sosial.	
		Peningkatan implementasi pemenuhan hak-hak anak melalui percepatan implementasi KLA	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada penyusunan regulasi dan kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.
	5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Inisiasi kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penguatan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
 tahun 2024 - 2026

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya Pengendalian Penduduk	1.1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia subur (15-49 tahun)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $i = \text{Kelompok Umur (15-19) Tahun s/d (45-49) Tahun}$ ASFR _i = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke i	BKKBN Provinsi Jawa Timur
Sasaran 2: Meningkatnya Pembangunan Keluarga	2.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan Keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi Ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga	$i\text{Bangga} = \frac{1}{3} \times (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan Keluarga}) \times 100$	BKKBN Provinsi Jawa Timur

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	3.1	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	Angka	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran untuk menilai kesetaraan kesempatan dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.	$IDG = \frac{1}{3} \times (E + P + I)$ $= \frac{1}{3} \times ((P_{prof} + P_{manaj})/2 + K_{perempuan}/K_{total} + (Y_{perem}/Y_{(laki-laki)})/1)$ <p>E (Indeks Partisipasi Ekonomi) Pprof = Proporsi perempuan dalam pekerjaan professional dan teknis Pmanaj = Proporsi perempuan dalam pekerjaan administratif dan manajerial</p> <p>P (Indeks Partisipasi Politik) Kperempuan = Jumlah kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan Ktotal = Jumlah total kursi parlemen</p> <p>I (Indeks Penguasaan Sumber Daya</p>	BPS Provinsi Jawa Timur

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Ekonomi) Yperempuan = Pendapatan Perkapita Perempuan yang disesuaikan Ylaki-laki = Pendapatan Perkapita Laki-laki yang disesuaikan	
Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	4.1	Rasio KDRT	Angka		Rasio KDRT = $\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	
Sasaran 5 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	5.1	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	Angka		% Anak yang tidak Terpenuhi Hak nya = $\frac{\text{Jumlah Anak yang TidakTerpenuhi Hak nya}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\%$	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024-2025

B. RENCANA KERJA Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 :

Tabel 2.3

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			<ul style="list-style-type: none"> • Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) • Indeks Ketimpangan Gender • Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) 	Angka Angka Skor	0,60 0,168 700
		1.1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,08
		1.2	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,8
		1.3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,10

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		an Gender			
		1.4 Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	Rasio	0,02 - 0,05
		1.5 Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	%	0,837
		1.6 Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggara n Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP pada Dinas PPKB PP dan PA	Skor	87,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB PP dan PA	Skor	83,95

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Fotal Fertility Rate (TFR)	2,08	Angka
2	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	24,72	Angka
3	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	80,75	Angka
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	a. Rasio KDRT b. Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	a. 0,02 – 0,05 b. 700	a. 0,02 – 0,05 b. Skor
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80, 50	Skor

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan :

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100 %	965.396.800
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Kegiatan	235.000.000
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1 Kegiatan	730.396.800
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	71,9 %	5.959.601.137
3	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	12 Kegiatan	1.554.403.200
4	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100 %	1.121.582.937

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
5	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	100 %	2.951.865.000
6	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	331.750.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	73 %	4.128.600.000
7	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	797.800.000
8	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	3.330.800.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	43 %	170.000.000
9	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000
10	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	120.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan	100 %	300.000.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	300.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA)	76 Skor	100.000.000
12	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	100.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	1 Kegiatan	200.000.000
13	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	1 Kegiatan	120.000.000
14	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM	1 Kegiatan	80.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN DPPKBPPPA terhadap Layanan Kesekretariatan DPPKBPPPA	80,5 Skor	5.604.581.805
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen	125.000.000
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	87 %	2.925.681.805
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	360.000.000
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	872.000.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	1.101.900.000
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	163 Unit	220.000.000
TOTAL				17.428.179.742

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal November tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran n, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,085	Angka

2	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,50	Angka
3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	72,10	Angka
4	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,02 – 0,05	Angka
5	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	0,837	%
6	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP	87,00	Skor
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95	Skor

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	43 %	170.000.000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakanrn Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan	100 korban	300.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk Tercapainya KLA	76 %	100.000.000
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	100.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	1 kegiatan	200.000.000
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	1 kegiatan	120.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM	1 kegiatan	80.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas PPKB PP dan PA terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas PPKB PP dan PA	80 Skor	5.415.787.500
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen	128.803.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	87 %	2.779.113.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	430.421.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	872.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	967.150.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	164 Unit	238.300.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100 %	1.007.622.300
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Kegiatan	235.000.000
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	772.622.300
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	71,9 %	5.959.601.137
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	12 Dokumen	1.554.403.200
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100 %	2.421.549.937
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan	100 %	1.651.898.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	331.750.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	73 %	4.128.600.000
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	797.800.000
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	3.330.800.000
TOTAL				17.281.610.937

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara

berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,085	*Nilai belum ada	-	-	BKKBN Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,50	65,92	102,20%	Sangat Berhasil	BKKBN Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	72,10	*Nilai belum ada	-	-	BPS Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,02 – 0,05	0,014	130%	Sangat Berhasil	Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	0,837	0,623	125,57%	Sangat Berhasil	Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP	87,00	94,83	109%	Sangat Berhasil	LHE Inspektorat
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95	83,99	100,05%	Sangat Berhasil	eSKM

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

- Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Nilai TFR ideal untuk menjaga pertumbuhan penduduk yang ideal adalah 2,1 yang berarti setiap wanita selama masa suburnya rata-rata memiliki 2,1 anak. Nilai TFR yang terlalu tinggi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang cepat sedangkan TFR yang terlalu rendah menyebabkan penurunan jumlah penduduk.

- **Indeks Pembangunan Keluarga**

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Pada Tahun 2024 capaian iBangga Kabupaten Magetan adalah 65,92 sehingga termasuk dalam kategori Pembangunan keluarga cukup baik (Berkembang).

- **Indeks Pemberdayaan Gender**

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban daripada sistem tersebut. Keadilan gender terjadi jika tercipta suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan Perempuan.

- **Rasio KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang di dalam rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Pada tahun 2024 capaian rasio KDRT Kabupaten Magetan adalah sebesar 0,014 yang dapat digambarkan bahwa pada setiap 100.000 keluarga terdapat 1,4 kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- **Persentase Anak yang Tidak Terpenuhi Hak-nya**

Terdapat empat pilar utama hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Di Kabupaten Magetan masih terdapat beberapa kasus anak yang tidak terpenuhi hak-nya, hal ini terlihat dari capaian persentase anak yang tidak terpenuhi hak nya sebesar 0,623% dari total keseluruhan anak yang ada di Kabupaten Magetan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,14	2,10	101,87%	2,09	2,09	100%	2,085	*Nilai belum ada	-
Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	58,55	-	-	64,29	-	64,50	65,92	102,20%
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	61,38	71,45	116,41%	70,51	72,08	102,23%	72,10	*Nilai belum ada	-
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,04	0,02	150	0,02-0,05	0,0189	105,5%	0,02 – 0,05	0,014	130%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	-	-	-	-	-	-	0,837	0,623	125,57%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP	-	77,30	-	-	85,95	-	87,00	94,83	109%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	80,794	100,37%	80,05	83,91	104,24%	83,95	83,99	100,05%

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2024, capaian indeks pembangunan keluarga (iBangga) sebesar 65,92 menunjukkan tren yang positif sejak 2 tahun sebelumnya yaitu 54,55 pada tahun 2022 dan 64,29 pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa dari sisi kebahagiaan, ketentraman dan kemandirian keluarga di Kabupaten Magetan terus meningkat, sehingga tujuan dari Pembangunan keluarga tercapai.

Peningkatan capaian kinerja juga dapat dilihat dari capaian rasio KDRT dimana pada tahun 2023 capaian rasio KDRT sebesar 0,02 dan pada tahun 2024 sebesar 0,014 pada tahun 2024. Rasio KDRT merupakan indikator negative sehingga semakin kecil nilai yang dicapai maka semakin baik, artinya semakin sedikit kasus KDRT yang terjadi pada keluarga/rumah tangga.

Indikator Persentase pemenuhan hak nak merupakan indikator yang baru pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan sehingga belum terdapat angka capaian pada tahun sebelumnya. Akan tetapi capaian atas indikator tersebut menunjukkan hasil yang baik dilihat dari capaian yang telah melampaui target, yaitu dari target 0,837% tercapai 0,637%.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	*Nilai belum ada	2,07	
2	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,92	65,50	100,64%
3	Meningkatnya Pengarusutamaan	Indek Peberdayaan	*Nilai belum ada	72,20	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Gender	Gender (IDG)			
4	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,014	0,02-0,05	130,00%
5	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	0,623	0,817	123,75%
6	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP	94,83	90,00	105,37%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	84,00	100,00%

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

Dari tabel 3.4 diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 keseluruhan indikator sasaran telah mencapai target akhir Rencana Strategis 2024-2026 yang telah disusun. Bahkan terdapat beberapa indikator yang telah tercapai melebihi target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program kerjanya. Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan meningkatkan kinerja maka diperlukan adanya penguatan kerjasama berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,92	62,7	105,14%

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2024 ini capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Magetan lebih tinggi daripada Pembangunan keluarga Provinsi Jawa Timur dengan capaian 105,14%. Hal ini menunjukkan bahwa Pembangunan keluarga yang ada di Kabupaten Magetan yang diukur dari dimensi kemandirian, kebahagiaan dan ketentraman yang lebih baik daripada rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu dengan status Pembangunan keluarga berkembang.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,085	*Nilai belum ada	-	Penggunaan dan efektifitas kontrasepsi serta menurunnya usia kawin pertama wanita

Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,50	65,92	102,20%	Meningkatnya kualitas kelompok-kelompok Tribina Keluarga (BKB, BKR, BKL)
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	72,10	*Nilai belum ada	-	Semakin banyaknya kesempatan yang terbuka untuk perempuan
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,02 – 0,05	0,014	130%	Semakin banyaknya Masyarakat yang sadar untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	0,837	0,623	125,57%	Tercapainya penurunan kekerasan terhadap anak dan pemenuhan dokumen adminduk kepada anak
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP	87,00	94,83	109%	Pemenuhan Dokumen SAKIP yang tepat waktu
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95	83,99	100,05%	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2024, capaian iBangga adalah sebesar 65,92. Hal ini didukung oleh Penyebab keberhasilan adalah meningkatnya kualitas kelompok-kelompok Tribina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dengan adanya Sekolah-sekolah Orang tua Hebat pada kelompok BKB di Desa-desa dan Sekolah Lansia Tangguh pada kelompok BKL di sebagian Desa. Selain itu juga peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok-kelompok PIK Remaja di Sekolah-sekolah dan Desa-desa, adanya Duta Genre di tingkat Desa, kecamatan maupun Kabupaten. Ada juga peningkatan kualitas

Ketahanan Ekonomi Keluarga melalui kelompok-kelompok UPPKA melalui kegiatan pameran produk unggulan UPPKA, Pelatihan ketrampilan bagi kelompok-kelompok UPPKA dan pemberian ATTG bagi kelompok UPPKA.

Selanjutnya untuk rasio KDRT yang di capai Kabupaten Magetan pada Tahun 2024 menunjukkan angka yang relative rendah yaitu 0,014. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya Masyarakat yang sadar untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan. Dengan terlapornya tidak kekerasan sehingga kasus tersebut dapat terdampingi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta seluruh stakeholder yang berwenang. Edukasi mengenai pencegahan kekerasan juga terus ditingkatkan dengan menyasar pada berbagai lapisan Masyarakat.

Penurunan rasio KDRT juga berkaitan pada penurunan persentase anak yang tidak terpenuhi haknya yaitu menurunnya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak. Hal ini mendukung pemenuhan salah satu hak dasar anak yaitu hak perlindungan. Pada tahun 2024 capaian persentase anak yang tidak terpenuhi haknya adalah sebesar 0,637%. Selain itu pemenuhan terhadap terhadap hak anak juga didukung oleh pemenuhan administrasi kependudukan anak, penyediaan sarana Pendidikan yang layak serta pemberian kesempatan kepada anak untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Adanya kelompok masyarakat yang tidak mau melakukan KB dengan alasan budaya dan agama	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pendekatan dengan tokoh agama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Masih adanya sebagian keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia belum tergabung dalam kelompok BKB, BKR dan BKL	Menugaskan kepada para Penyuluh KB, Kader-kader KB untuk meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan BKB, BKR dan BKL.
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	Masih kurangnya peran perempuan di bidang ekonomi, politik, Hukum dan pengambilan keputusan	Peningkatan Sumber Daya Manusia terutama kaum perempuan di bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	Sebagian besar masyarakat masih menganggap tabu dan tidak berani melapor	Sosialisasi dan Advokasi kepada masyarakat untuk berani melapor apabila terjadi tindak kekerasan
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	Masyarakat yang belum sadar akan pentingnya Hak-hak Anak	Terpenuhinya Pemenuhan Hak anak melalui penurunan kasus keekrasan, pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi Anak berhadapan dengan Hukum ke sekolah
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Keterkaitan antar dokumen perencanaan	Konsistensi dan keselarasan isi dalam penyusunan antar dokumen SAKIP
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persyaratan dan prosedur pemberian layanan yang masih belum dipahami Masyarakat.	Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat melalui berbagai kegiatan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	*Nilai belum ada	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100%	1.007.622.300	Menunjang
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	100%	235.000.000	Menunjang
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	100%	772.622.300	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	101%	5.959.601.137	Menunjang
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam	100%	1.554.403.200	Menunjang

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pencitraan Program KKBPK			
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100%	2.421.549.937	Menunjang
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan	100%	1.651.898.000	Menunjang
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	331.750.000	Menunjang
Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	102,20%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	100%	4.128.600.000	Menunjang

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
	(iBangga)		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	797.800.000	Menunjang
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	3.330.800.000	Menunjang
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	*Nilai belum ada	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	105%	170.000.000	Menunjang
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakanrn Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	Menunjang
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan	100%	120.000.000	Menunjang

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
			dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di Bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	130%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan	100%	300.000.000	Menunjang
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	300.000.000	Menunjang
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	100%	200.000.000	Menunjang
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	100%	120.000.000	Menunjang

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM	100%	80.000.000	Menunjang
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	125,57%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk Tercapainya KLA	87%	100.000.000	Menunjang
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	100%	100.000.000	Menunjang
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP	Nilai SAKIP	109%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas PPKB PP dan PA terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas PPKB PP dan PA	100%	5.415.787.500	Menunjang
	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,05%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100%	128.803.000	Menunjang

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
dan PA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	110%	2.779.113.000	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	430.421.500	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	100%	872.000.000	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	967.150.000	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	238.300.000	Menunjang

Dari Tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan menunjang dalam pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Hal ini terlihat dari capaian masing-masing indikator program dan kegiatan yang rata-rata telah tercapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
					Capaian
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PPPA	170.000.000	162.182.490	95,40%
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	PPPA	50.000.000	47.330.450	94,66%
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	PPPA	120.000.000	114.852.040	95,71%
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PPPA	300.000.000	282.477.100	94,16%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PPPA	300.000.000	282.477.100	94,16%
III	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		100.000.000	94.338.000	94,34%

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
					Capaian
4	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	PPPA	100.000.000	94.338.000	94,34%
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PPPA	200.000.000	191.591.050	95,80%
5	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	PPPA	120.000.000	116.929.800	97,44%
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PPPA	80.000.000	74.661.250	93,33%
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT	5.415.787.500	5.215.654.997	96,30%
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	128.803.000	114.795.607	89,12%
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	2.779.113.000	2.750.110.975	98,96%
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	430.421.500	412.434.269	95,82%
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT	872.000.000	852.516.322	97,77%
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT	967.150.000	852.976.503	88,19%
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT	238.300.000	232.821.321	97,70%
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PPAPS	1.007.622.300	977.102.949	96,97%
13	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	PPAPS	235.000.000	227.960.000	97,00%
14	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	PPAPS	772.622.300	749.142.949	96,96%

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
					Capaian
	Kabupaten/Kota				
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	KB	5.959.601.137	5.569.527.444	93,45%
15	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	KB	1.554.403.200	1.459.519.494	93,90%
16	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	KB	2.421.549.937	2367176650	97,75%
17	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	KB	1.651.898.000	1412831250	85,53%
18	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	KB	331.750.000	330.000.050	99,47%
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	K3	4.128.600.000	4.082.797.150	98,89%
19	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	K3	797.800.000	768.947.400	96,38%
20	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	K3	3.330.800.000	3.313.849.750	99,49%
TOTAL			17.281.610.937	16.575.671.180	95,92%

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,085	*Nilai belum ada	-	6.967.223.437	6.546.630.393	93,96%	-
Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,5	65,92	102,20%	4.128.600.000	4.082.797.150	98,89%	3,24%
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	72,1	*Nilai belum ada	-	170.000.000	162.182.490	95,40%	-
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,02 – 0,05	0,014	130%	500.000.000	474.068.150	94,81%	27,07%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	0,837	0,623	125,57%	100.000.000	94.338.000	94,34%	24,87%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP	87	94,83	109%	5.415.787.500	5.215.654.997	96,30%	11,65%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95	83,99	100,05%				3,74%

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan tabel 3.10 diatas bisa dilihat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan telah melaksanakan kerjanya dengan baik dilihat dari capaian kerjanya yang rata-rata diatas 100%. Namun demikian pencapaian kinerja tersebut tetap di iringi dengan efisiensi atas alokasi anggaran dengan nilai efisiensi tertinggi sebesar

27,07% yaitu dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	43	45.166	105.04%	170,000,000	162,182,490	95.40%	9.17%
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	100.00%	50,000,000	47,330,450	94.66%	5.34%
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100.00%	120,000,000	114,852,040	95.71%	4.29%
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100	100	100.00%	300,000,000	282,477,100	94.16%	5.84%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100.00%	300,000,000	282,477,100	94.16%	5.84%
III	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	76	66	86.84%	100,000,000	94,338,000	94.34%	-8.63%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisa	%	Anggaran	Realisasi	%	
4	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100.00%	100,000,000	94,338,000	94.34%	5.66%
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	1	100.00%	200,000,000	191,591,050	95.80%	4.20%
5	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100.00%	120,000,000	116,929,800	97.44%	2.56%
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100.00%	80,000,000	74,661,250	93.33%	6.67%
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80	80	100.00%	5,415,787,500	5,215,654,997	96.30%	3.70%
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	14	100.00%	128,803,000	114,795,607	89.12%	10.88%
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87	95.92	110.25%	2,779,113,000	2,750,110,975	98.96%	10.25%
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100.00%	430,421,500	412,434,269	95.82%	4.18%
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	100.00%	872,000,000	852,516,322	97.77%	2.23%
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100.00%	967,150,000	852,976,503	88.19%	11.81%
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164	164	100.00%	238,300,000	232,821,321	97.70%	2.30%
VI	PROGRAM PENGENDALIAN	100	100	100.00%	1,007,622,300	977,102,949	96.97%	3.03%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisa	%	Anggaran	Realisasi	%	
	PENDUDUK							
13	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	1	100.00%	235,000,000	227,960,000	97.00%	3.00%
14	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100.00%	772,622,300	749,142,949	96.96%	3.04%
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	71.9	72.37	100.65%	5,959,601,137	5,569,527,444	93.45%	7.15%
15	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12	12	100.00%	1,554,403,200	1,459,519,494	93.90%	6.10%
16	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100	100	100.00%	2,421,549,937	2,367,176,650	97.75%	2.25%
17	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100.00%	1,651,898,000	1,412,831,250	85.53%	14.47%
18	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	100	100.00%	331,750,000	330,000,050	99.47%	0.53%
VII I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	73	73	100.00%	4,128,600,000	4,082,797,150	98.89%	1.11%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisa	%	Anggaran	Realisasi	%	
	SEJAHTERA (KS)							
19	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	100	100.00%	797,800,000	768,947,400	96.38%	3.62%
20	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	100	100.00%	3,330,800,000	3,313,849,750	99.49%	0.51%
RATA - RATA								4.68%

Analisis efisiensi atas sumberdaya dalam pencapaian sasaran strategis yang tersaji pada tabel 3.10 kemudian pada tabel 3.11 dianalisis kembali efisiensinya berdasarkan program kegiatan yang mendukung tercapainya program dan sasaran. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan telah mencapai target atas seluruh program dan kegiatan dimana pencapaian kinerja tersebut juga di iringi dengan efisiensi atas penggunaan sumber dana dengan nilai rata-rata efisiensi sebesar 4,68%.

D. INOVASI TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan adalah dengan meluncurkan aplikasi SIPANGKAS. SI PANGKAS (System Informasi Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting) merupakan instrumen sederhana secara online yang akan digunakan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk merekam atau mencatat kegiatan-kegiatan pendampingan bagi Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Ibu yang memiliki Bayi dibawah

usia 2 tahun yang nantinya hasil perekaman atau pencatatan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pengambil kebijakan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Selain itu instrumen ini kedepannya bisa digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kegiatan yang selama ini dilakukan secara fisik atau printout yang membutuhkan ATK yang cukup besar.

Tujuan dari inovasi ini diantaranya Tujuan Inovasi

1. Tersedianya aplikasi online/System Informasi terkait dengan pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi dibawah 2 tahun.
2. Dalam melakukan pendampingan kepada sasaran, Tim Pendamping Keluarga mampu menginput data sasaran sesuai dengan item-item yang ada dalam aplikasi online.
3. Tersedianya data sasaran pendampingan yaitu : calon pengantin, ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi dibawah 2 tahun sebesar 75%.
4. Berkurangnya penyebab stunting akibat pola asuh orang tua terhadap anak melalui pendampingan, edukasi, penyuluhan oleh kader TPK.

Berikut beberapa dokumentasi penerapan inovasi SIPANGKAS



**Sosialisasi awal SI PANGKAS di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Takeran*



**Uji coba SI PANGKAS di Balai penyuluhan KB Kecamatan Poncol*

SI PANGKAS

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

*** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**

PENGERTIAN SI PANGKAS

SI PANGKAS (System Informasi Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting) merupakan instrumen sederhana secara online yang akan digunakan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk merekam atau mencatat kegiatan-kegiatan pendampingan bagi Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Ibu yang memiliki Bayi dibawah usia 2 tahun yang nantinya hasil perekaman atau pencatatan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pengambil

penurunan stunting

KEGIATAN PENDAMPINGAN KELUARGA BERESIKO STUNTING OLEH TPK

TAHUN

Jawaban Anda

BULAN *

Pilih

**Pergisian Aplikasi SIPANGKAS*

The image shows two panels of the SIPANGKAS application. The left panel is the user profile page for 'SI PANGKAS', displaying the email 'desir488@gmail.com' and a selection menu. The selected option is 'PENDAMPINGAN IBU HAMIL'. The right panel is the registration form, which includes fields for NIK, Nama, Alamat, Tanggal Kunjungan, Kunjungan ke-, and Usia (Bulan). Each field has a 'Jawaban Anda' label and a text input area.

**Perngisian Aplikasi SIPANGKAS*

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024 (*dengan foto*)

Selama Tahun 2024, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak antara lain:

1. BKB Terbaik III Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 atas nama BKB Merpati IX, Kel. Selosari Magetan
2. Juara II Apresiasi Kampung Keluarga Berkualitas Tk. Provinsi Jawa Timur atas nama Kampung KB Desa Bogoarum, Kecamatan Plaosan
3. Juara Harapan I Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik tk. Provinsi Jawa Timur Kategori Pasangan KB Lestari 20 Tahun atas nama Pasangan Ibu Darwati dan Bapak Suparno Nguntoronadi
4. Juara III Praktik Baik Satyagatra tingkat Provinsi Jawa Timurn Tahun 2024 atas nama Satyagatra Sidorejo Berkelas Balai Penyuluhan Kecamatan Sidorejo

5. Juara III Kehadiran Terbanyak Peserta Kelas Orang Tua Hebat Modul BKB Emas Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur
6. Terbaik IV Peserta Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) a.n Sri Hastutik

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magetan yang termuat dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 6 (enam) sasaran dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Pengendalian Penduduk

- Sasaran ke-1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan nilai capaian masih menunggu data realese dari BKKBN Provinsi Jawa Timur
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;

- Sasaran ke-1 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 2: Meningkatnya Pembangunan Keluarga

- Sasaran ke-2 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,20% (kategori Sangat Berhasil)
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (Satu) Program yang terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (Dua) Kegiatan terdiri dari 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 3: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender

- Sasaran ke-3 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja masih menunggu data realese dari BPS Provinsi Jawa Timur
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (Satu) Program yang terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh 2 (Dua) Kegiatan terdiri dari 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)

Sasaran 4: Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak

- Sasaran ke-4 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 130% (kategori Sangat Berhasil)
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-4 didukung oleh 2 (Dua) Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)
- Sasaran ke-4 didukung oleh 3 (Tiga) Kegiatan terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)

Sasaran 5: Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

- Sasaran ke-5 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 125,57% (kategori Sangat Berhasil)
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-5 didukung oleh 1 (Satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 87% (kategori Berhasil)
- Sasaran ke-5 didukung oleh 1 (Satu) Kegiatan terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 6: Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA

- Sasaran ke-6 terdiri dari 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat berhasil)
- Seluruh indikator kinerja telah/tidak mencapai target;
- Sasaran ke-6 didukung oleh 1 (Satu) Program yang terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-6 didukung oleh 6 (Enam) Kegiatan terdiri dari 6 (Enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2.085		
Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64.5	65.92	102.20%
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	72.1		
Meningkatnya Perlindungan terhadap	Rasio KDRT	0,02 – 0,05	0.014	130%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
perempuan dan anak				
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	0.837	0.623	125.57%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP	87	94.83	109%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.95	83.99	100.05%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 6 (Enam) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja diatas 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp16.575.671.180 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 4,68%

Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023. Serapan anggaran tahun 2024 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,5 %. Faktor utama yang mendukung hal ini adalah terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan kinerja perangkat daerah tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan menemui beberapa kendala dan hambatan, diantaranya :

1. Kurang optimalnya intervensi yang kolaboratif dengan perangkat daerah lain dalam pelaksanaan program kegiatan
2. Kurangnya pemahaman tugas kader dan tenaga lini lapangan dikarenakan seringnya pergantian personil.
3. Implementasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena kebijakan belum menysasar dilini bawah

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-

tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Adapun Upaya yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada stakeholder untuk menjalin kerjasama yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Melaksanakan advokasi kepada Kepala Desa agar tetap mempertahankan kader dan lini lapangan yang sudah ada
3. Perlunya Advokasi Kepada Lini Paling Bawah desa dan Pengerak Lapangan terkait PPPA serta adanya regulasi mengenai Kader PPPA / SAPA
4. Meningkatkan advokasi dan edukasi kepada masyarakat agar memperoleh informasi yang cukup mengenai penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2025
Tujuan : Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Advokasi terhadap pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR
	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatkan peran serta perempuan dalam semua aspek pembangunan
	Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Peningkatan implementasi pemenuhan hak-hak anak melalui percepatan implementasi KLA

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2025
Anak		
Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi yang efektif serta peningkatan profesionalisme aparatur, pemberdayaan institusi dan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat
Sasaran 2 : Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia untuk mewujudkan keluarga yang bahagia
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengarutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	- Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. - Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya - Peningkatan kapasitas perempuan dalam Proporsi Kursi yang di duduki Perempuan di DPRD
Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
Sasaran 5 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	% Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	Inisiasi kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP pada Dinas PPKB PP dan PA	Memastikan konsistensi atau keselarasan pada setiap dokumen perencanaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB PP dan PA	Meningkatkan pelayanan baik dari sisi sarana dan prasaran, personil pemberi layanan serta kemudahan persyaratan pelayanan

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)				2,08	2,08
Sasaran 2 : Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				65	65
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)				72,15	72,15
Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT				0,02 - 0,05	0,02 - 0,05
Sasaran 5 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	% Anak yang tidak terpenuhi Hak nya				0,827	0,827
Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP pada Dinas PPKB PP dan PA				88,5	88,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB PP dan				83,97	83,97

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
	PA					

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Februari 2025

KEPALA DINAS PPKB PP DA PA
KABUPATEN MAGETAN



SUWITO, A. M. Si

Pembina Utama Muda/ IV, C

NIP : 197312291994121001

LAMPIRAN:

A. Matriks Renstra terakhir

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100	120.000.000	100	132.000.000	100	145.000.000	300	397.000.000
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.000.000	3	397.000.000
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk								

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	3	67.000.000
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	3	330.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	71,9	1.542.000.000	72,00	1.622.000.000	72,10	1.785.000.000	72,10	4.949.000.000
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100	982.000.000	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	3.082.000.000
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1378	982.000.000	1378	1.000.000.000	1378	1.100.000.000	4.134	3.082.000.000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	100	490.000.000	100	545.000.000	100	600.000.000	100	1.635.000.000
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	150.000.000	100	165.000.000	100	180.000.000	300	495.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	30	50.000.000	35	55.000.000	40	60.000.000	105	165.000.000
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	18	120.000.000	18	135.000.000	18	150.000.000	54	405.000.000
		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	445	170.000.000	470	190.000.000	520	210.000.000	1435	570.000.000
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	70.000.000	100	77.000.000	100	85.000.000	100	232.000.000
		Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6	70.000.000	6	77.000.000	6	85.000.000	18	232.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	73	290.000.000	73	320.000.000	73	350.000.000	73	960.000.000
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	100.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	330.000.000
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200	100.000.000	200	110.000.000	200	120.000.000	600	330.000.000
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	190.000.000	100	210.000.000	100	230.000.000	100	630.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	3	330.000.000
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	4	165.000.000
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	3	135.000.000
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	43	200.000.000	43	220.000.000	43	240.000.000	43	660.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	6	165.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	6	165.000.000
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	150.000.000	2	165.000.000	2	180.000.000	6	495.000.000
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	150.000.000	2	165.000.000	2	180.000.000	6	495.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan	100	330.000.000	100	360.000.000	100	390.000.000	100	1.080.000.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	330.000.000	1	360.000.000	1	390.000.000	3	1.080.000.000
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	330.000.000	1	360.000.000	1	390.000.000	3	1.080.000.000
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA)	76	150.000.000	76	165.000.000	76	180.000.000	76	495.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	150.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	3	495.000.000
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	150.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	3	495.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan		-		-		-		0
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan		-		-		-	0	0

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM		-		-		-	0	0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5	5.983.388.045	80,60	6.192.888.045	80,70	6.451.388.045	80,70	18.627.664.135
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14	185.000.000	14	203.500.000	14	220.000.000	42	608.500.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	85.000.000	8	93.500.000	8	100.000.000	24	278.500.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	6	100.000.	6	110.000.	6	120.000.	18	330.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
			Perangkat Daerah		000		000		000		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	87	3.091.388.045	87	3.093.888.045	87	3.096.388.045	261	9.281.664.135
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	3.066.388.045	22	3.066.388.045	22	3.066.388.045	66	9.199.164.135
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.000.000	6	82.500.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	485.000.000	12	538.000.000	12	589.500.000	36	1.612.500.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	36	44.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	200.000.000	12	220.000.000	12	240.000.000	36	660.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	22.000.000	12	25.000.000	12	27.500.000	36	74.500.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	30.000.000	12	33.000.000	12	36.000.000	36	99.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	17.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	36	59.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	4.000.000	12	5.000.000	12	7.000.000	36	16.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	200.000.000	12	220.000.000	12	240.000.000	36	660.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	872.000.000	1	900.000.000	1	950.000.000	3	2.722.000.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	872.000.000	1	900.000.000	1	950.000.000	3	2.722.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	1.030.000.000	12	1.105.000.000	12	1.210.000.000	36	3.345.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	36	165.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	980.000.000	12	1.050.000.000	12	1.150.000.000	36	3.180.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	163	320.000.000	163	352.500.000	163	385.500.000	489	1.058.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	95.000.000	9	105.000.000	9	115.500.000	27	315.500.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135	75.000.000	135	82.500.000	135	90.000.000	405	247.500.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	19	150.000.000	19	165.000.000	19	180.000.000	57	495.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100	375.000.000	100	412.500.000	100	450.000.000	300	1.237.500.000
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1	300.000.000	1	330.000.000	1	360.000.000	3	990.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1	300.000.000	1	330.000.000	1	360.000.000	3	990.000.000
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.000.000	3	247.500.000
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	24	75.000.000	24	82.500.000	24	90.000.000	72	247.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	71,9	305.000.000	72,00	335.500.000	72,10	370.000.000	72,10	1.010.500.000
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam	12	100.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	36	330.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
			Pencitraan Program KKBPK								
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	3	330.000.000
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100	205.000.000	100	225.500.000	100	250.000.000	100	680.500.000
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1	205.000.000	1	225.500.000	1	250.000.000	3	680.500.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	73	450.000.000	73	495.000.000	73	540.000.000	73	1.485.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	450.000.000	100	495.000.000	100	540.000.000	100	1.485.000.000
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	3	100.000.000	3	110.000.000	3	120.000.000	9	330.000.000
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	235	300.000.000	235	330.000.000	235	360.000.000	705	990.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	3	165.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	1	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	76	600.000.000
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	3	360.000.000
		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	3	360.000.000
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	3	240.000.000
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	3	240.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026			
				Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18
TOTAL					9.945.38 8.045		10.454.8 88.045		11.101.3 88.045		31.501.6 64.135

B. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- INSTANSI : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- VISI :
- MISI :
- TUGAS : Membantu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR			
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ <p><i>i</i> = Kelompok Umur (15-19) Tahun s/d (45-49) Tahun ASFR_{<i>i</i>} = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke <i>i</i></p>	Bidang PPAPS	Dinas PPKB PP dan PA

NO.	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR			
2.	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	$iBangga = \frac{1}{3} \times (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan Keluarga}) \times 100$	BKKBN	Dinas PPKB PP dan PA
3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{1}{3} \times (E + P + I)$ $= \frac{1}{3} \times \left(\frac{P_{prof} + P_{manaj}}{2} + \frac{K_{perempuan}}{K_{total}} + \frac{Y_{perem}}{Y_{laki-laki}} \right)$ <ul style="list-style-type: none"> • E (Indeks Partisipasi Ekonomi) P_{prof} = Proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional dan teknis P_{manaj} = Proporsi perempuan dalam pekerjaan administratif dan manajerial • P (Indeks Partisipasi Politik) $K_{perempuan}$ = Jumlah kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan K_{total} = Jumlah total kursi parlemen • I (Indeks Penguasaan Sumber Daya Ekonomi) $Y_{perempuan}$ = Pendapatan Perkapita Perempuan yang disesuaikan $Y_{laki-laki}$ = Pendapatan Perkapita Laki-laki yang disesuaikan 	BPS Provinsi Jawa Timur	Dinas PPKB PP dan PA

NO.	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR			
4.	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Bidang PPPA	Dinas PPKB PP dan PA
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	% Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	$\frac{\text{Jumlah Anak yang Tidak Terpenuhi Hak nya}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\%$	Bidang PPPA	Dinas PPKB PP dan PA

Magetan, Juli 2024
 Plt Kepala Dinas PPKB PP dan PA
 Kabupaten Magetan



Ir. MIFTAHUDDIN
 Pembina Tk. I
 NIP. 19671026 199302 1 001

C. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target kinerja		Anggaran
		Volume	Satuan	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	43	%	170.000.000
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan KebijakanrnPengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	50.000.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	120.000.000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	120.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan	100	korban	300.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk Tercapainya KLA	76	%	100.000.000
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	1	Dokumen	100.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	Organisasi	100.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target kinerja		Anggaran
		Volume	Satuan	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	1	kegiatan	200.000.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	1	kegiatan	120.000.000
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1	Kegiatan	120.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Managemen Peningkatan SDM	1	kegiatan	80.000.000
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1	Kegiatan	80.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas PPKB PP dan PA terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas PPKB PP dan PA	80	Skor	5.415.787.500
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14	Dokumen	128.803.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	50.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	78.803.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	87	%	2.779.113.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308	Orang/bulan	2.754.113.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	25.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Paket	430.421.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target kinerja		Anggaran
		Volume	Satuan	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	195.421.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	22.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	30.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	17.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	4.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	150.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	872.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	872.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	967.150.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	45.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	922.150.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	164	Unit	238.300.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	85.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	142	Unit	77.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	Unit	75.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100	%	1.007.622.300

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target kinerja		Anggaran
		Volume	Satuan	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1	Kegiatan	235.000.000
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1	Kegiatan	235.000.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1	Dokumen	772.622.300
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	Laporan	15.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	Dokumen	75.000.000
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	204.600.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Dokumen	375.796.800
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	24	Unit	102.225.500
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	71	%	5.959.601.137
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	12	Dokumen	1.554.403.200
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	Laporan	140.000.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20	Laporan	684.403.200
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	1	Laporan	270.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target kinerja		Anggaran
		Volume	Satuan	
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	Dokumen	60.000.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2	Dokumen	150.000.000
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	29	Organisasi	250.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100	%	2.421.549.937
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1378	Orang	1.066.582.937
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1	Laporan	1.354.967.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan	100	%	1.651.898.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2	Laporan	27.800.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	Orang	1.338.448.000
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	20	Laporan	30.000.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	8	Unit	130.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target kinerja		Anggaran
		Volume	Satuan	
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	445	Orang	100.000.000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	Laporan	25.650.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	%	331.750.000
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6	Organisasi	50.000.000
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen	7.932.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	49	Kampung	273.818.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	73	%	4.128.600.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	797.800.000
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200	Keluarga	50.000.000
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui	8	Laporan /	172.800.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target kinerja		Anggaran
		Volume	Satuan	
Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Dokumen	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Laporan	35.000.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	25	Unit	300.000.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	235	Orang	200.000.000
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	3	Kelompok	40.000.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	3.330.800.000
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Laporan	25.000.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	Organisasi	25.000.000
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	Laporan	30.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target kinerja		Anggaran
		Volume	Satuan	
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10	laporan	1.548.000.000
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10	laporan	1.702.800.000
TOTAL				17.281.610.937

D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Teuku Umar No.55 Magetan Kode Pos 63351
Telp. 0351 – 123456 faks (0351) 123456
Email: dppkbpppa@magetankab.go.id website: <https://dppkbpppa.magetan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Magetan

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, MT.
Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ir. HERGUNADI, MT.

Pihak Pertama,

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740206 200003 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Fotal Fertility Rate (TFR)	2,085 Angka
2.	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	24,80 angka
3.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	80,81 angka
4.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	a. Rasio KDRT b. Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	a. 0,02 – 0,05 angka b. 715 Skor
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,20 Skor

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 170.000.000	-
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp 300.000.000	-
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 100.000.000	-
4	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 200.000.000	-
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.604.581.805	-
6	Program Pengendalian Penduduk	Rp 965.396.800	-
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5.959.601.137	-
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 4.128.600.000	-
JUMLAH		Rp 17.428.179.742	

Magetan, Januari 2024



I. HERGUNADI, MT.

Plt. KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA
 KABUPATEN MAGETAN


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740206 200003 1 004

- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Teuku Umar No.55 Magetan Kode Pos 63351

Telp. 0351 – 123456 faks (0351) 123456

Email: dppkbpppa@magetankab.go.id website: <https://dppkbpppa.magetan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWITO, AP, M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Magetan

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : NIZHAMUL, S.E., M.M

Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, November 2024

Pihak Kedua,

NIZHAMUL, S.E., M.M

Pihak Pertama,

SUWITO, AP, M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 19731229 199412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,085 Angka
2.	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,50 angka
3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	72,10 angka
4.	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,02 – 0,05 angka
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	0,837%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	a. Nilai SAKIP	87,00 Skor
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95 Skor

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 170.000.000	-
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp 300.000.000	-
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 100.000.000	-
4	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 200.000.000	-
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.415.787.500	-
6	Program Pengendalian Penduduk	Rp 1.007.622.300	-
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5.959.601.137	-
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 4.128.600.000	-

JUMLAH Rp 17.281.610.937

Magetan, November 2024

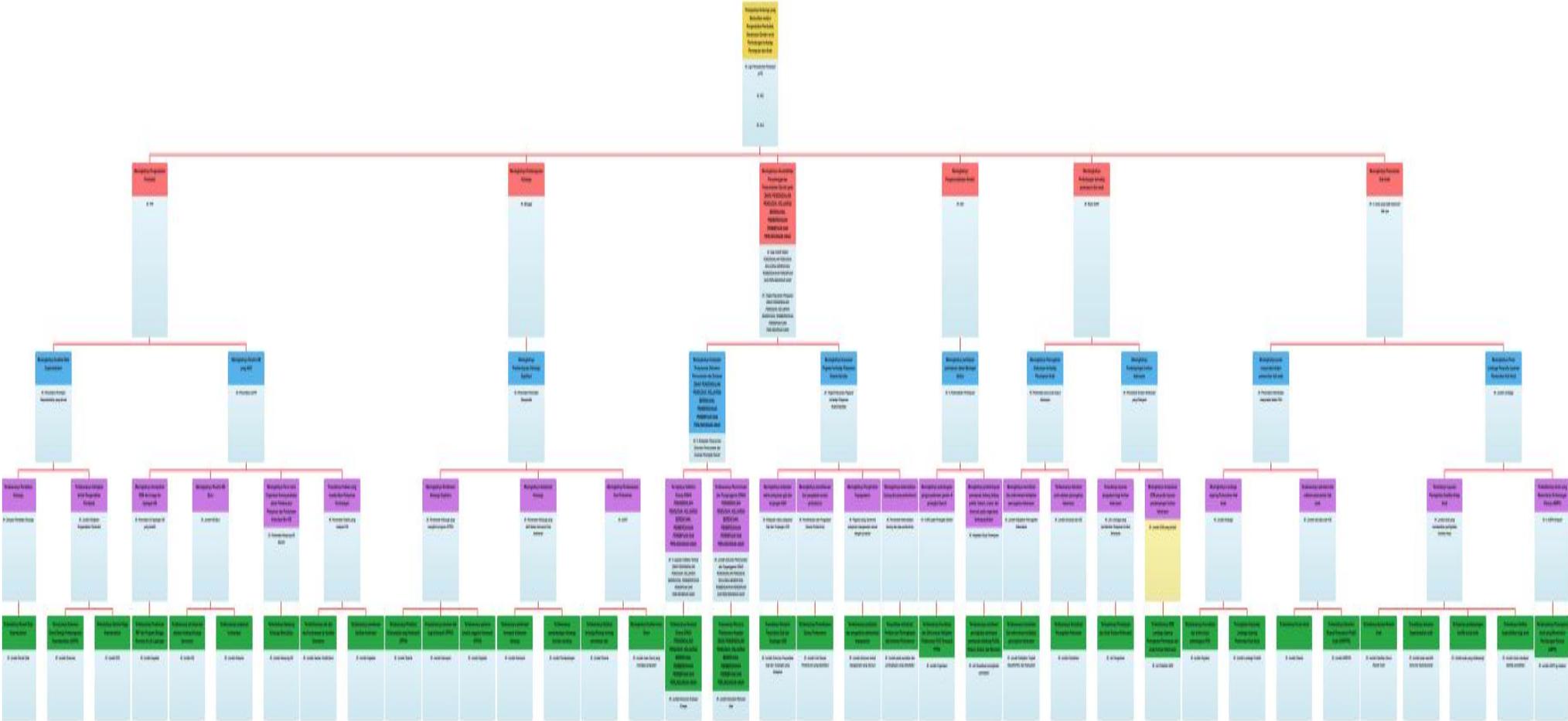


E. Pengukuran Kinerja

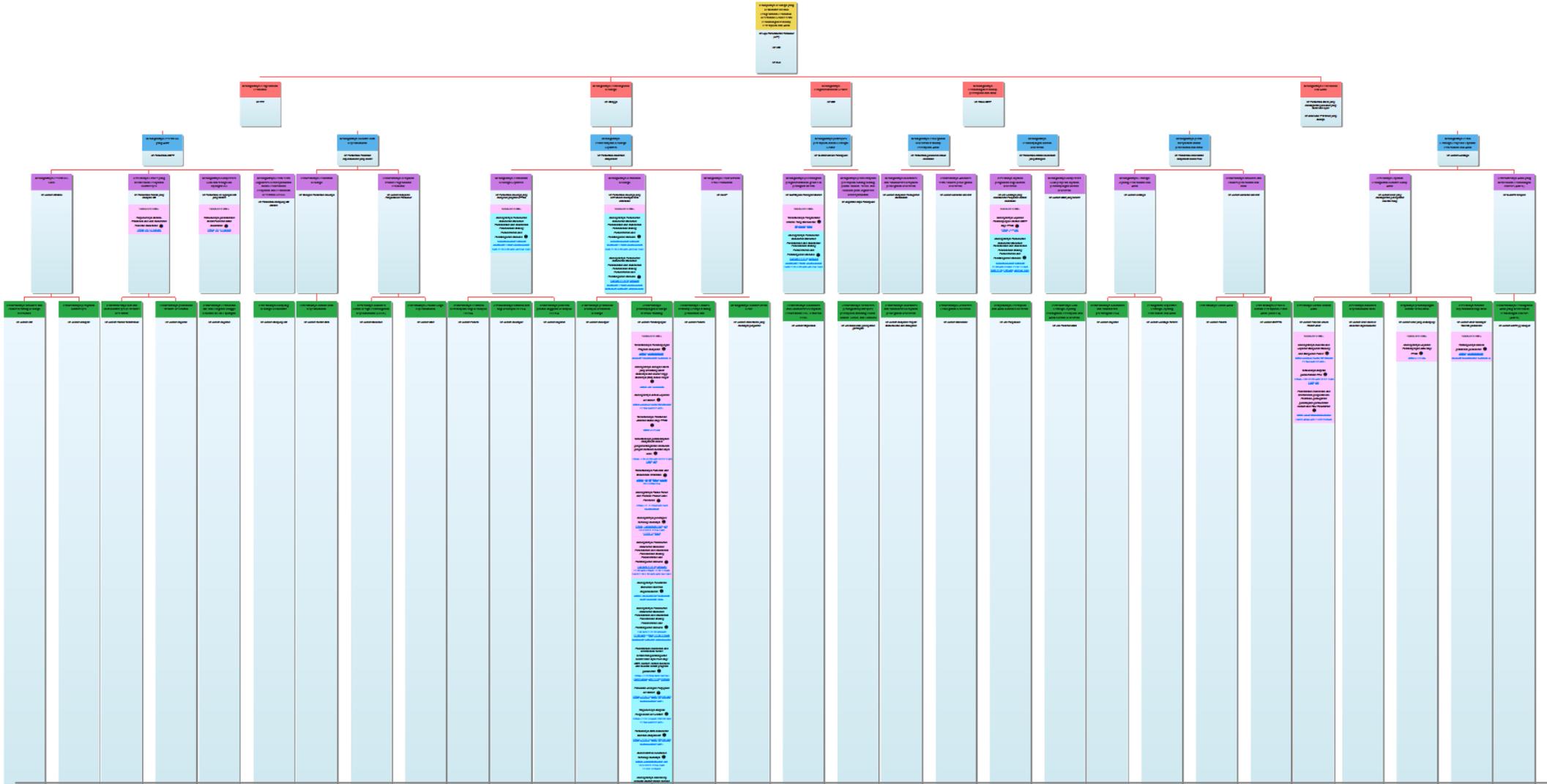
Hasil capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kategori
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,085			
Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,5	65,92	102,20%	Sangat Baik
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	72,1			
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,02 – 0,05	0,014	130%	Sangat Baik
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya	0,837	0,623	125,57%	Sangat Baik
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA	Nilai SAKIP	87	94,83	109%	Sangat Baik
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95	83,99	100,05%	Sangat Baik

F. Pohon Kinerja



G. Crosscutting



Crosscutting Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan :

NO	OPD	CROSSCUTTING
1	Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Kesehatan
		Pelatihan tenaga medis pelayanan kontrasepsi (CTU)
		Upaya percepatan penurunan stunting
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembentukan Kampung KB
		Pembentukan kelompok bina ketahanan keluarga
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyediaan data kependudukan
		Penerbitan dokumen kependudukan anak
4	Dinas Sosial	Pendampingan korban kekerasan
		Upaya percepatan penurunan stunting
		Pendampingan konflik sosial anak
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	Upaya percepatan penurunan stunting
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Upaya percepatan penurunan stunting
		Pemenuhan Sarana yang ramah anak
7	Bappeda Litbang	Upaya percepatan penurunan stunting
8	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Upaya percepatan penurunan stunting
		Penyediaan fasilitas kependidikan
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Upaya percepatan penurunan stunting
		Pemenuhan Sarana yang ramah anak
10	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	Upaya percepatan penurunan stunting
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan Sarana yang ramah anak
		Upaya percepatan penurunan stunting
12	Seluruh OPD	Perencanaan Anggaran Responsif Gender

H. Cascading

KEPALA DAERAH	Tujuan RPJMD	Meningkatkan Kualitas SDM <i>Indeks Pembangunan Manusia</i>													
	Sasaran RPJMD	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat <i>Indeks Kesehatan</i>													
KEPALA PERANGKAT DAERAH	Tujuan Perangkat Daerah	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LPP, IKG, KLA													
	Sasaran Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengendalian Penduduk <i>TFR</i>	Meningkatnya Pembangunan Keluarga <i>ibnaga</i>	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender <i>IDG</i>	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak <i>Rasio KDRT</i>	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak									
KEPALA BIDANG	Program	Program Pengendalian Penduduk <i>Persentase Ketersediaan Data Kependudukan</i>	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) <i>Persentase Capaian CPR</i>	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera <i>Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga</i>	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan <i>% Perempuan di Lembaga</i>	Program Perlindungan Perempuan <i>Terlayannya Jumlah Korban Kekerasan Kepada Perempuan</i>	Program Perlindungan Khusus Anak <i>Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan</i>	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) <i>Skor KLA</i>							
	Kegiatan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
KEPALA SEKSI	Anggaran	235.000.000	730.396.800	1.554.403.200	1.121.582.937	2.951.885.000	331.750.000	797.800.000	3.330.800.000	50.000.000	120.000.000	300.000.000	80.000.000	120.000.000	100.000.000